

IMPLIKASI PENGELOLAAN KRISIS EKONOMI OLEH KONSORSIUM TROIKA TERHADAP EKONOMI DAN POLITIK YUNANI

By: Febriyana

Febriyanahyohunnies@yahoo.com

Supervisor: Drs. Tri Joko Waluyo, M.Si

Library of Riau University

Department of Government
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas km. 12,5 Simp. New Pekanbaru
Phone (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Abstract

The title of this research is “Implication of economic crisis management by Consortium Troika to economics and politics domestic of Greece during 2009-2012 periode. The management of Greece crisis by Consortium Troika (European Commission, European Central Bank, and International Monetary Fund) as a regime.

This research uses international regimes theory and liberalism perspective. The Consortium Troika make the rules, such as bail out, applying high taxes, etc.

As implication of Consortium Troika’s rules, economics Greece is low, wich is characterized by rising unemployment, deficit reduction and a decrease in the tourism sector. The politics domestic condition is not good, make George Papandreou resign to be Greece Prime Minister, Greece public protest, and there is competition of political parties between Demokrasi Baru, Pasok, and Syriza.

Key Words: Economic crisis, Consortium Troika, regime, economics and politics domestic of Greece.

PENDAHULUAN

Yunani merupakan sebuah negara kepulauan di Laut Mediterania. Orang Yunani menyebut nama negara mereka dengan sebutan Hellas, atau Ellada dan menyebut diri mereka sebagai bangsa Hellen. Dalam bahasa Inggris negara tersebut biasa disebut Greece. Kemungkinan besar Greece di ambil dari sebuah nama latin yaitu Graeco yang dikaitkan daerah semenanjung Apenina yang menjadi koloni bangsa Yunani disebut dengan Magna Graecia. Kata Greece pertama kali digunakan oleh bangsa Romawi untuk menyebut peradaban di Italia Selatan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan Yunani yang kemungkinan besar diambil dari kata Ionia yaitu salah satu suku bangsa yang amat berpengaruh dalam sejarah Yunani. (Sudrajat.”*Yunani Sebagai Icon Peradaban Barat*”. Diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/YUNANI%20SEBAGAI%20ICON%20PERADABAN%20BARAT%20.pdf>, pada tanggal 29 April 2015, pkl. 19:46 WIB).

Yunani adalah sebuah negara berkembang dengan standar kehidupan yang tinggi. Industri-industri utama Yunani adalah pariwisata, perkapalan, produk industri, pemrosesan makanan dan tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan dan perminyakan. Pertumbuhan GDP, rata-rata, sejak tahun 1990-an lebih tinggi daripada rata-rata anggota Uni Eropa. Namun, ekonomi Yunani juga menghadapi masalah-masalah yang signifikan, termasuk naiknya tingkat pengangguran, birokrasi yang tidak efisien, penghindaran dari

pajak dan tentu saja korupsi. Yunani menderita dari korupsi ekonomi dan politik yang tinggi serta kompetisi global yang rendah bila dibandingkan dengan rekan-rekan Uni Eropa lainnya. (Rizky Musafir. “*Faktor-Faktor Penghambat Uni Eropa Dalam Usaha Perbaikan Ekonomi dan Politik Yunani*”. Diakses melalui <http://repository.upnyk.ac.id/1562/1/SUMMARY.pdf>, pada tanggal 17 Januari 2015, pkl. 12:06 WIB).

Salah satu isu utama dalam Uni Eropa adalah krisis ekonomi dan politik di Yunani yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009. Kedua, defisit keuangan pemerintah dan utang publik yang sangat besar dari sejumlah negara zona euro. Krisis ekonomi Yunani juga membuat negara-negara anggota Uni Eropa lainnya ikut terkena krisis, seperti Portugal, Italia, Irlandia, dan Spanyol. Krisis Yunani semakin buruk pada tahun 2011 yang dapat mengancam kelangsungan mata uang tunggal, euro.

Menurut laporan tahunan dari Komisi Eropa, rasio utang publik terhadap PDB di 17 negara zona euro terus meroket setelah krisis ekonomi global 2008-2009. Untuk tahun 2011, rasio itu diperkirakan mencapai hampir 88 persen dan akan bertambah menjadi 88,7 persen dari PDB pada tahun 2012.

Ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah negara, karena apabila sebuah negara terkena krisis maka kestabilan ekonomi akan menjadi taruhan kelanjutan perekonomian

suatu negara. Krisis yang terjadi di Yunani bermula dari krisis ekonomi ternyata membuat politik di Yunani juga ikut terkena karena pengambilan keputusan dari pengelolaan krisis di Yunani juga diambil oleh partai politik yang ada di Yunani yang membuat persaingan partai politik di Yunani semakin berat karena ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan yang akan diambil nantinya.

Untuk mengatasi krisis Yunani yang semakin memburuk, maka dibentuklah Konsorsium Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF). Kerangka kerja sama antara Yunani dan Troika ini tercantum dalam *Memorandum Economic of Financial Policies* (MEFP) yang disertai dengan pemberian dana talangan. Mengingat adanya *moral hazard*, Troika memutuskan tidak mencairkan bantuan sebelum Yunani membenahi kebijakan fiskalnya. Maka, berdasarkan negosiasi antara Yunani dan Troika disepakati Yunani harus melakukan pemotongan anggaran, pengurangan upah dan penundaan pensiun selama tiga tahun, dan kenaikan pajak untuk mengatasi masalah fiskal dan utang Yunani, serta dengan reformasi yang dirancang untuk memulihkan perekonomian Yunani. (International Monetary Fund. “*Staff-Level Agreement: Europe and IMF Agree 110 Billion Euro Financing Plan With Greece.*” Diakses dari: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/car050210a.htm>, diakses tanggal 21 November 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Krisis Yunani terhadap Nilai Euro

Keinginan besar Uni Eropa adalah mengenai kesatuan mata uang dalam Euro. Hal ini diatur dalam sebuah traktat yang bernama Traktat Maastricht yang dikeluarkan pada tahun 1993. Traktat ini mengatur tentang berapa besar inflasi yang diperbolehkan oleh sebuah negara anggota Uni Eropa, defisit dalam hal *Gross Domestic Product* (GDP) dan juga *Exchange Rate* yang diatur dalam *European Monetary System* (EMS). Yunani adalah negara kecil di Uni Eropa yang tidak cukup kuat secara ekonomi. Kegagalan pemerintahan dalam memerintah dan juga krisis global yang membuat ekonomi Yunani semakin parah merupakan penyebab mengapa negara ini tertimpa krisis.

Yunani resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981. Sebagai negara anggota Uni Eropa, tentunya semua kebijakan baik itu kebijakan ekonomi maupun politik akan berpengaruh terhadap stabilitas Uni Eropa karena pada Januari 2002 Yunani juga resmi bergabung dengan eurozone dan mulai mengadopsi euro sebagai mata uang menggantikan drachma sebagai mata uang sebelumnya.

Euro juga telah membawa dampak positif baik bagi perekonomian global maupun Eropa, seperti: (Jurnal Kajian Wilayah Eropa, *Journal of European Studies*. Volume II No. 2-2006. Hal 104).

1. Penyatuan moneter ini telah mengintegrasikan kekuatan ekonomi Eropa dan memperbaiki daya saing ekonomi internasional Eropa.

2. Euro telah menciptakan stabilitas nilai tukar di negara-negara anggotanya.
3. Posisi keuangan internasional Eropa meningkat. Pada tahun 1997-2000, proporsi Euro dalam sekuritas internasional meningkat dari 24% menjadi 47%.
4. Peluncuran Euro menyebabkan terjadinya reorganisasi massal dan penyesuaian kembali (*readjustment*) sistem perbankan, bisnis keuangan, dan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan skala operasi yang lebih besar dan peningkatan kapabilitas emergensi dan resistensi resiko atau krisis di Eropa.

Krisis yang terjadi di Yunani pada tahun 2009 membuat kestabilan organisasi kawasan ini juga terkena dampaknya, salah satunya jatuhnya nilai euro. Keputusan membuat euro sebagai mata uang tunggal ternyata juga membawa dampak buruk bagi perekonomian Uni Eropa. Sejak krisis Yunani ini, terjadi penurunan kepercayaan mata uang Euro dari investor-investor asing.

Krisis Yunani menunjukkan sebuah sikap yang berbeda di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara anggota mempunyai semangat berbeda dalam menyelamatkan Yunani. Hal ini dikarenakan awal kehadiran mereka membentuk dan ikut serta dalam keanggotaan Uni Eropa tentu dikarenakan kepentingan yang berbeda-beda yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Kurangnya kontrol terhadap pengaturan kebijakan fiskal terhadap negara anggota yang memakai

mata uang Euro juga menjadi sorotan. Melalui krisis ini terlihat bahwa Bank Sentral Eropa seperti kehilangan kontrol terhadap kebijakan fiskal negara-negara anggota Uni Eropa. Tentunya krisis ini mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara anggota Uni Eropa lainnya terutama yang tergolong lemah dan memakai euro sebagai mata uang negaranya.

Nilai tukar euro terhadap dolar melemah pada level rendah selama 10 bulan setelah pemimpin Prancis dan Jerman mengatakan bahwa paket bantuan untuk Yunani membutuhkan campuran Dana Moneter Internasional (IMF). Kenyataan ini menurunkan kepercayaan investor di kawasan Eropa. Nilai tukar mata uang euro ini juga jatuh terhadap yen dan poundsterling. Menurut Stuart Bennett yang merupakan ahli strategi mata uang senior di *Credit Agricole Corporate and Investment Bank* di London, jika Yunani mendapat paket bantuan dari IMF, maka ada sesuatu yang salah dalam proses politik Eropa. Hal ini menepis kepercayaan pada euro.

Banyak pihak mulai menanyakan keberadaan mata uang euro dan kemapanan serta kesulitan diantara para anggota uni eropa. Isu ini di landasi kenyataan yang ada mengenai ketidakmampuan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di zona eropa. Apalagi kemudian juga muncul wacana untuk mengeluarkan Yunani dari zona euro. Hal ini tentunya didasarkan akan kekhawatiran yang beralasan, disamping ada negara-negara di Uni Eropa yang tidak mematuhi kesepakatan sehingga diperlukan sanksi tegas. Djoko Setyo Hartono. (*"Ekonomi Islam sebagai Solusi*

Alternatif Krisis Ekonomi Eropa". Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi UNIMUS, 2011. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=4508&val=426>, pada 01 Mei 2015, pkl. 23:09 WIB).

Dinamika Krisis Yunani

Yunani (Greece) adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang pada hakikatnya segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa).

Bergabungnya Yunani dalam Komunitas Eropa sebenarnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, namun Yunani kesulitan beradaptasi dengan kompetisi pasar karena industri di Eropa Utara sudah lebih maju dan mapan. Akibatnya, terjadi penurunan PDB per kapita yakni dari 58 % PDB per kapita rata-rata ME di tahun 1980, menjadi 52 % pada tahun 1991. Antara tahun 1980-1990-an, Yunani memiliki utang yang besar terkait dengan defisit anggaran. (<http://elib.unikom.ac.id/files/di>

sk1/711/jbptunikompp-gdl-herdiharja-35513-8-babiii.pdf, diakses tanggal 13 Maret 2015, pkl. 14:100 WIB).

Bila ditilik ke belakang, Yunani menjadi satu-satunya anggota Komunitas Eropa yang ingin menjadi bagian dari Perjanjian *Maastricht* namun tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan oleh inflasi, defisit anggaran, utang, dan suku bunga yang tinggi. Kemudian Yunani berusaha memperbaiki perekonomiannya dengan program penghematan dan usaha ini membuahkan hasil positif. Yunani akhirnya dapat memenuhi kriteria; inflasi 2,1%, defisit anggaran 1,7% dari PDB (di bawah 3% ketentuan Perjanjian *Maastricht*) dan resmi tahun 2001 Yunani dapat bergabung dengan Uni Eropa. Dalam perjalanan selanjutnya, Yunani tergabung dalam zona *Euro*. Namun, pada akhirnya terkuak fakta bahwa data-data ekonomi yang memuluskan langkah Yunani menjadi bagian dari zona *euro* adalah semua hasil rekayasa' (Ibid, hlm. 65).

Permasalahan fiskal yang terjadi di Yunani mulai menjadi perhatian dunia internasional setelah pemilihan legislatif pada Oktober 2009. Beberapa minggu setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani, George Papandreou mengumumkan bahwa persentase defisit Yunani sebenarnya mencapai 12,7% dari jumlah PDB. Jumlah ini tentunya memiliki selisih yang jauh dari total defisit yang diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Costas Caramanlis, yaitu sebesar 6%. Defisit fiskal Yunani semakin memburuk secara signifikan seiring dengan memburuknya dampak krisis ekonomi

global 2008 yang melanda tidak hanya negara di Eropa, melainkan hampir seluruh negara di dunia. Setelah mengalami dinamika perekonomian yang fluktuatif, akhirnya pada tahun 2009 Yunani memasuki resesi yang berkepanjangan. Defisit fiskal yang Yunani yang terakumulasi dari hutang yang membengkak memicu terjadinya Krisis Ekonomi. *Balance of payment* Yunani sendiri selalu menunjukkan angka defisit yang konsisten jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya khususnya di Eropa. (Opcit, hlm. 69).

Tabel 1.1
Defisit Anggaran Yunani Tahun 2004-2010 (Persen PDB)

No.	Tahun	Persentase
1.	2004	-7,5
2	2005	-5,2
3.	2006	-5,7
4.	2007	-6,4
5.	2008	-9,8
6.	2009	-15,4
7.	2010	-10,5

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Tinjauan Ekonomi Triwulanan, Triwulan IV/2011. "Krisis Keuangan Eropa: Dampak terhadap Perekonomian Indonesia". 2011

Khususnya Yunani sebenarnya sudah mengalami masalah defisit anggaran dan utang publik jauh sebelum krisis ekonomi global itu terjadi. Negara-negara zona euro yang juga mengalami kondisi relatif sama seperti Yunani (defisit anggaran dan/atau pemerintah yang sangat besar) antara lain Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia. Menurut laporan tahunan Komisi Eropa yang dikeluarkan di Brussels, Belgia, 12 September 2011, negara-negara tersebut

menghadapi potensi krisis utang lebih parah. (Tulus Tambunan. 2012. "Memahami Krisis: Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi". Jakarta: LP3ES).

Menurut analisis dari Surendro (2010), kondisi fiskal Yunani yang buruk tersebut sebenarnya mencuat pada triwulan keempat tahun 2009 ketika pemerintah negara tersebut melaporkan revisi perkiraan defisit fiskal negara itu kepada Eurostat. Defisit keuangan pemerintah Yunani yang semula dilaporkan hanya sekitar 3,7 persen terhadap PDB, menjadi sangat besar di dalam laporan revisi tersebut yang mencapai sekitar 13,6 persen dari PDB. Jumlah utang Yunani juga paling besar setelah Italia di dalam kelompok zona euro per 21 Juli 2011 tercatat mencapai 350 miliar euro (setara dengan 499 miliar dollar AS), atau sekitar 160 persen dari PDB, dan pada akhir Juli 2011 menjadi kurang lebih 172 persen dari PDB yang dianggap sebagai batas aman. Kelihatannya rasio utang terhadap PDB Yunani dalam waktu pendek ke depan masih akan terus naik. Kondisi Yunani menjadi tambah parah setelah keluar pernyataan resmi dari pemerintahnya mengenai ketidakmampuannya membayar utangnya yang jatuh tempo sebanyak 8,5 miliar euro pada tanggal 19 Mei 2010, kecuali jika pemerintah Yunani bisa mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa dan IMF. (Ibid, Tulus Tambunan, hlm. 227).

Konsorsium Troika dan Krisis Ekonomi Yunani

Krisis Yunani yang berdampak pada stabilitas Uni Eropa membuat

Portugal, Irlandia, dan Spanyol juga ikut terseret krisis. Hal ini tentu saja tidak baik bagi perekonomian Uni Eropa di tengah integrasinya sebagai organisasi kawasan yang dinilai berhasil sejauh ini. Untuk itu, Uni Eropa dan Yunani harus membuat keputusan langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk menyelamatkan Yunani.

Berbagai program penanganan krisis yang dilakukan oleh Uni Eropa belum mampu secara tuntas menyelesaikan krisis di kawasan Eropa. Hal tersebut disebabkan tidak saja karena belum ditemukannya formula kebijakan komprehensif yang disepakati bersama oleh seluruh anggota Uni Eropa dalam penanganan krisis, namun juga berbagai riak politik yang terjadi di *Euro Zone*, khususnya pada negara-negara yang terkena krisis yang ditandai oleh pergantian pimpinan pemerintahan. (Irfa Ampri. “Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global”. Diakses melalui 2012_kajian_pkppim_KajianG20_peningkatan_kapasitas_pendanaan_imf_dalam_mengatasi_krisis_keuangan_global.pdf, pada tanggal 23 November 2014, pkl. 11:08 WIB).

Untuk menganalisis mengenai peran konsorsium Troika dalam mengelola krisis Yunani, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan konsorsium Troika. Konsorsium secara etimologi berasal dari bahasa latin “con-“ (*together*) dan “- sors” (*fate*). Dengan demikian dapat diartikan bahwa “konsorsium” adalah sebuah asosiasi dari dua atau lebih individu, perusahaan, organisasi atau pemerintah (atau kombinasi dari entitas

tersebut) yang bersepakat dan berkomitmen dalam suatu kegiatan serta secara bersama-sama memberdayakan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan bersama. (LIPI. “Mendorong Inovasi Domestik Melalui Kebijakan Lintas Lembaga”. Diakses melalui <http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321317974943.makalah.pdf>, diakses tanggal 02 Mei 2015, pkl. 20:47 WIB).

Keputusan dalam membuat kebijakan untuk pengelolaan krisis Yunani melibatkan Troika, Gubernur Bank Sentral Yunani, Menteri Keuangan Yunani, dan Perdana Menteri Yunani. Kebijakan yang tertuang dalam MEFP telah melalui proses yang panjang dari negosiasi antara Yunani dan Troika untuk menentukan pengelolaan krisis. Ketika Yunani membuat *Letter of Intent* untuk permintaan program pengelolaan krisis di bawah *Stand-By Arrangement* IMF untuk periode 36 bulan, Yunani telah menyiapkan *Memorandum of Economic and Fiscal Policies* dan *Technical Memorandum of Understanding* yang sudah dirancang bersama dengan Troika.

Namun, dengan adanya *request of Stand-By Arrangement* pada IMF yang tertulis dalam *letter of intent* dapat dianalisis bahwa dalam keputusan pengelolaan krisis pada rezim konsorsium Troika ini didominasi oleh IMF. Sehingga kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan krisis ini merupakan kebijakan yang biasa IMF terapkan pada negara-negara yang meminta bantuan IMF untuk mengelola krisis.

Hak dan kewajiban konsorsium Troika dalam mengelola krisis Yunani

tertuang dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* pertama yaitu pada Mei 2010. MEFP secara singkat dijelaskan dalam jawaban IMF atas *Request for Stand By Arrangement* dari Menteri Keuangan Yunani dan Gubernur Bank Sentral Yunani. Dalam kerangka kerjasama antara IMF, Komisi Eropa, dan Bank Sentral Eropa disebutkan kerjasama Troika dalam pengelolaan krisis Yunani meliputi tiga hal, yaitu: (IMF. 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand By-Arrangement. P.5.).

1. Program Design

Program yang di desain harus mewakili kerangka yang terkoordinasi atas penyesuaian kebijakan dan pendanaan yang didukung oleh Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF. Program diatur dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* dan *Technical Memorandum of Understanding* dari IMF dan *Memorandum of Economic and Financial Policies* dan *Memorandum of Understanding* dari Komisi Eropa. MEFP ini berfokus pada kebijakan makro ekonomi dan langkah-langkah struktural yang dipilih, sedangkan MoU meliputi agenda reformasi struktural penuh disepakati antara pemerintah dan EC.

2. Program Monitoring

Tinjauan IMF atas program pengelolaan krisis berdasar pada kerangka kuartal standar kriteria kinerja dan tolok ukur struktural. Tinjauan Komisi Eropa didasarkan pada penilaian secara keseluruhan terhadap kemajuan agenda struktural dalam MoU serta target makroekonomi. Komisi Eropa melakukan penilaian ini bersama Bank Sentral Eropa, dan kemudian membuat rekomendasi kepada menteri keuangan

eurozone untuk menyetujui pengeluaran bantuan. Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF mengeluarkan bantuan dengan proporsi 3:8 antara IMF dan mekanisme pembiayaan Eropa.

3. Financing Arrangement

Pinjaman Yunani akan diatur oleh perjanjian pinjaman tunggal antara Yunani dan negara-negara euro, ditandatangani oleh Komisi Eropa atas nama *eurozone* yang mencakup tiga tahun penuh program. Pinjaman memiliki jatuh tempo yang sama dengan pinjaman IMF dengan tingkat suku bunga mengambang. Yunani mendapat bantuan dari Troika dengan rasio konstan 3:8 antara IMF dan Komisi Eropa sepanjang periode program.

Kebijakan yang dibuat oleh Troika mengakomodir keputusan IMF sebagai lembaga internasional yang berpengalaman mengatasi krisis, Bank Sentral Eropa sebagai penentu kebijakan moneter yang dikawal oleh Komisi Eropa. Sebagai timbal balik dari pinjaman yang diberikan oleh Troika, Yunani harus melakukan reformasi struktural, pemotongan belanja pemerintah, dan menaikkan pajak.

Tabel 1.2
Kontribusi 15 Negara
Anggota Eurozone dalam Paket
Bailout Yunani

Negara	ECB Paid Kapital Key	Besar Kontribusi (milyar euro)
Austria	2,86	2,290
Belanda	3,58	2,861
Belgia	5,88	5,704
Cyprus	0,20	0,161
Finlandia	1,85	1,479

IMF	-	30
Irlandia	1,64	1,310
Italia	18,42	14,739
Jerman	27,92	22,336
Luksemburg	0,26	0,206
Malta	0,09	0,075
Perancis	0,97	16,774
Portugal	2,58	2,065
Slovakia	1,02	0,818
Slovenia	0,48	0,388
Spanyol	12,24	9,794
Total	100%	110 Miliar Euro

Sumber: *European Commission*

Dana sebesar 110 miliar euro atau setara dengan Rp 1,314 triliun yang diberikan pada tanggal 21-22 juli 2011. Akan tetapi hal ini ternyata tidak mampu menolong lebih lanjut keterpurukan ekonomi makro negara Yunani yang mempunyai utang sampai 328 miliar euro dengan defisit mencapai 10,5% pada tahun 2010. Kondisi ini disikapi negatif oleh rakyat Yunani yang tidak mau menanggung kesalahan yang dibuat oleh para bankir dan eksekutif pemerintahan. Lebih spesifik bahwa kebijakan pengambilan utang untuk membiayai proyek pemerintah, sistem pengawasan pajak yang rendah, manipulasi akuntansi dituding sebagai penyebab awal terjadinya krisis serta tidak kuatnya basis ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Yunani rata-rata pada tahun 1995 – 2008 mencapai 3,6% , tetapi di prediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi -3%. (Ibid, Djoko Setyo Hartono).

Pengangguran di Yunani mencetak angka tertinggi pada Mei yaitu mencapai 27,6%, menurut badan statistik

negara. Angka tersebut menunjukan kenaikan dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada Mei tahun lalu sebesar 23,8%. Kelompok usia terbesar yang tidak memiliki pekerjaan adalah usia 15-24 dengan persentase mencapai 64,9%. Laporan ini muncul seiring adanya pertemuan antara Perdana Menteri Yunani Antonis Samaras dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington. Dalam pertemuan tersebut Obama memuji pemerintah Yunani yang mengambil langkah-langkah untuk mengurangi tumpukan utang. Namun dia mendesak Samaras untuk menyeimbangkan langkah penghematan dengan langkah untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pekerjaan. Yunani saat ini berada dalam tahun keenam resesi dan menunjukan pelemahan 25% terhadap produksinya pada 2007. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130809_bisnis_pengangguran_yunani, diakses tanggal 16 Februari 2015, pl. 17:51 WIB).

Tingkat pengangguran di Yunani melonjak pada kuartal kedua tahun 2012 akibat krisis ekonomi yang melanda negara itu dan dampak dari krisis di Zona Euro. Menurut data yang dirilis pada 13 September, pengangguran naik menjadi 23,6 persen pada kuartal kedua dari 22,6 persen pada kuartal pertama. Data juga menyebutkan bahwa lebih dari 1,16 juta orang terdaftar sebagai pengangguran. Pihak yang paling parah menjadi korban krisis pengangguran adalah warga yang berusia 24 tahun dengan tingkat pengangguran 53,9 persen. Sementara, mereka yang berumur 25-29 juga menghadapi angka yang tinggi hingga 36,8 persen. Di sisi lain, krisis juga

berdampak buruk terhadap perempuan dengan tingkat pengangguran mencapai 27,3 persen dibandingkan dengan laki-laki 20,8 persen. (*"Pengangguran di Yunani Semakin Bertambah"*, diakses dari <http://www.sinarpaginews.com/fullpost/ekonomi/1347579885/pengangguran-di-yunani-terus-bertambah.html>, diakses tanggal 16 Februari 2015, pkl. 18:26 WIB).

Paket bailout untuk Yunani mengharuskan pemerintah negara tersebut melakukan beberapa langkah pengetatan fiskal dengan tujuan agar defisit keuangannya bisa berkurang secara signifikan pada tahun 2014. Kebijakan yang tidak populis ini tentu akan mengurangi secara signifikan pengeluaran pemerintah disekeliling sektor yang jelas akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat, seperti pengurangan gaji pegawai negeri, pemangkasan tunjangan dan subsidi di bidang pangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan, peningkatan pajak, serta pembatalan sejumlah proyek pemerintah. Akibatnya, seperti yang terjadi dalam satu tahun terakhir ini, terjadi demonstrasi rakyat besar-besaran yang seringkali berakhir kerusuhan di negara tersebut.

Krisis utang Yunani yang berlangsung hampir setahun terakhir mencapai puncaknya dengan pengunduran diri PM George Papandreou pada hari Minggu tanggal 6 November 2011. Pengunduran diri PM Yunani itu terjadi setelah pertemuannya dengan Presiden Yunani Karolos Papoulias dan pemimpin oposisi Antonis Samaras. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan

ditunjuk Lucas Papademos, seorang teknokrat ekonomi yang pernah lama bekerja di Bank Dunia, sebagai pejabat Perdana Menteri sementara hingga 19 Februari 2012. Pembentukan pemerintahan baru dianggap sebagai solusi terbaik untuk menggantikan desakan digelarnya pemilu lebih awal yang dikhawatirkan hanya akan membawa Yunani ke dalam jurang krisis yang lebih dalam. Humphrey Wangke. (*"Krisis Utang di Zona Euro"*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. III. No. 22/II/P3DI/November 2011).

Turunnya Papandreou tidak terlepas dari tekanan negara-negara zona Euro karena stabilitas Yunani menjadi pertaruhan masa depan ekonomi dan politik zona Eropa. Krisis utang telah membuat Yunani bangkrut dan memerlukan bantuan dari IMF, Bank Sentral Eropa, dan Uni Eropa. Namun, ketiga troika ini tidak mau memberikan bantuan dana talangan apabila tidak ada kepastian dari Yunani, terutama komitmen dari para politisi Yunani. Tekanan itu terlihat dalam pertemuan tingkat menteri keuangan zona Eropa, Yunani diminta agar partai utama yang ada di Yunani yaitu partai Pasok dan Demokrasi Baru harus mengungkapkan secara tertulis komitmen mereka untuk Eropa. Itu berarti bahwa pemerintah baru yang terbentuk nanti, bersama-sama dengan kedua partai utama itu, harus membuat surat bukti komitmen Yunani atas tuntutan reformasi keuangan di bawah persyaratan penyelamatan yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF. (Ibid, Humphrey Wangke, hlm. 6).

KESIMPULAN

Krisis Yunani tahun 2009 yang disebabkan oleh ketidaksiplinan kebijakan fiskal, utang negara, buruknya birokrasi, dan korupsi membuat negara ini bangkrut hingga tidak bisa menyelamatkan negaranya sendiri dan perlu mendapat dana talangan dari beberapa negara Eropa dan IMF yang mana dana talangan pertama itu sebanyak 110 miliar euro tetapi tidak membuahkan hasil.

Krisis yang ditangani oleh Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF) ini memaksa Yunani harus melakukan reformasi birokrasi, reformasi struktural, pemotongan anggaran pemerintah, menaikkan pajak dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari dana talangan yang didapat. Akibatnya banyak sekali terjadi aksi demonstrasi untuk memprotes kebijakan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mereka.

Akibat lain yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut adalah banyaknya pengangguran karena perusahaan-perusahaan melakukan aksi PHK terhadap para pegawai dan pemotongan gaji pegawai dan pensiunan. Kebanyakan dari para pengangguran itu adalah angkatan muda dengan rentang usia antara 20-25 tahun.

Selain dampak ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan pengetatan anggaran oleh Troika, ternyata kebijakan ini juga menyeret perpolitikan Yunani ikut serta di dalamnya seperti pengunduran George Papandreou menjadi Perdana Menteri Yunani dan perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik di Yunani yang didominasi oleh 3 partai politik, yaitu

Demokrasi Baru, Pasok, dan Syriza. George Papandreou mendapat tekanan dari Uni Eropa karena stabilitas perekonomian Yunani menjadi pertarungan masa depan ekonomi dan politik Uni Eropa. George Papandreou yang awalnya ingin mengajukan referendum untuk melihat apakah masyarakat setuju atau tidak dengan kebijakan yang diajukan oleh Troika ini kemudian tidak jadi melakukannya karena keadaan Yunani yang sudah tidak mungkin lagi menunggu hasil referendum akibat krisis yang melanda. Bailout juga tidak akan diberikan Troika jika tidak ada kepastian dari Yunani, terutama dari para politisi Yunani. Selain itu, Demokrasi Baru dan Pasok sebagai 2 partai utama di Yunani juga diminta untuk memberikan surat bukti komitmen Yunani atas tuntutan reformasi keuangan di bawah persyaratan penyelamatan yang diberikan oleh Troika.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Humphrey Wangke. “*Krisis Utang di Zona Euro*”. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. III. No. 22/II/P3DI/November 2011

Buku

DEPARTEMEN KEUANGAN, DEPKOMINFO, BAPPENAS. “*Memahami Krisis Keuangan Global: Bagaimana Harus Bersikap?*”. 2008

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tinjauan Ekonomi Triwulanan, Triwulan

- IV/2011. “Krisis Keuangan Eropa: Dampak terhadap Perekonomian Indonesia”. 2011
- Tulus Tambunan. 2012. “Memahami Krisis: Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi”. Jakarta: LP3ES
- Internet**
- Sudrajat. ”Yunani Sebagai Icon Peradaban Barat”. Diakses melalui http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/YUNANI%20SEBAGAI%20ICON%20PERADABAN%20BARAT_0.pdf, pada tanggal 29 April 2015, pkl. 19:46 WIB
- Rizky Musafir. “Faktor-Faktor Penghambat Uni Eropa Dalam Usaha Perbaikan Ekonomi dan Politik Yunani”. Diakses melalui <http://repository.upnyk.ac.id/1562/1/SUMMARY.pdf>, pada tanggal 17 Januari 2015, pkl. 12:06 WIB
- Djoko Setyo Hartono. “Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif Krisis Ekonomi Eropa”. Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi UNIMUS, 2011. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=4508&val=426>, pada 01 Mei 2015, pkl. 23:09 WIB
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/jbptunikompp-gdl-herdiharja-35513-8-babiii.pdf>, diakses tanggal 13 Maret 2015, pkl. 14:100 WIB
- Irfa Ampri. “Arsitektur Keuangan Internasional: Peningkatan Kapasitas Pendanaan IMF Dalam Mengatasi Krisis Keuangan Global”. Diakses melalui 2012_kajian_pkppim_KajianG20_peningkatan kapasitas pendanaan IMF dalam mengatasi krisis keuangan global.pdf, pada tanggal 23 November 2014, pkl. 11:08 WIB
- LIPI. “Mendorong Inovasi Domestik Melalui Kebijakan Lintas Lembaga”. Diakses melalui <http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321317974943.makalah.pdf>, diakses tanggal 02 Mei 2015, pkl. 20:47 WIB
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/08/130809_bisnis_pengangguran_yunani, diakses tanggal 16 Februari 2015, pkl. 17:51 WIB
- “Pengangguran di Yunani Semakin Bertambah”, diakses dari <http://www.sinarpaginews.com/fullpost/ekonomi/1347579885/pengangguran-di-yunani-terus-bertambah.html>, diakses tanggal 16 Februari 2015, pkl. 18:26 WIB